

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2022



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 telah dapat diselesaikan penyusunannya, dimana penyusunannya lebih banyak mengacu kepada regulasi yang berlaku dan konsep-konsep yang bisa dipertanggungjawabkan.

Perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) pada ranah lokal merupakan hal yang signifikan jika dilihat dalam konteks upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah (*turbulence*), hal yang harus tetap dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah menjaga kepercayaan masyarakat melalui penyediaan *public good service*. Hal mana yang dirasakan oleh masyarakat sangat dinantikan untuk lebih optimal lagi adalah bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) BAPPEDA Tahun 2022 yang kami susun ini merupakan perwujudan kongkrit tingkat pencapaian kinerja (*performing government*) BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut yang merupakan salah satu SKPD yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Renstra Bappeda tahun

2018 – 2023 dimana tahun 2022 telah memasuki tahun ke-empat pada Renstra BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini dapat terlaksana berkat dukungan dan kerjasama unsur pimpinan beserta Staf di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut, dan pihak-pihak lainnya yang terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas bantuan tenaga, pikiran, dan sumber daya lainnya dari pihak-pihak yang terlibat diucapkan terima kasih.

Kami menyadari bahwa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya untuk meningkatkannya baik dalam penyajian maupun substansi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itulah sumbangan saran, masukan, dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari pihak manapun juga, baik individu maupun kelompok.

Selanjutnya kami berharap semoga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022, ini bisa memberi manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya dalam upaya untuk melakukan peningkatan kinerja secara khusus.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Pelaihari, Januari 2023

KEPALA BAPPEDA KAB.TANAH LAUT,

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	
KASUBBID/KASI	<i>[Signature]</i>

[Signature]
ANDRIS EVONY, S.STP., M.SI.
Pembina Utama Muda // IV c
NIP. 19790928 199711 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1. Latar Belakang	I-1
2. Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Tanah Laut	I-3
a. Struktur Organisasi	I-3
b. Kepegawaian	I-4
c. Kondisi Sarana dan Prasarana yg digunakan	I-7
d. Data Statistik	I-9
e. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	I-9
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	II-1
1. Urusan Wajib	II-1
2. Urusan Pilihan	II-1
3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	II-1
4. Urusan Pemerintahan Umum	II-21
BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	III-1
1. Tugas Pembantuan yg diterima dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi ...	III-1
2. Tugas Pembantuan yang diberikan	III-1
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	IV-1
1. Kerjasama Daerah	IV-1
2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	IV-1
3. Pengelolaan Kawasan Khusus	IV-1
4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	IV-1
5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV-1

BAB V	PENUTUP	V-1
1.	Kesimpulan.....	V-1
2.	Keberhasilan/Prestasi /Penghargaan.....	V-2



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Bappeda

Lampiran 2. Rekap Belanja Langsung

Lampiran 3. Laporan Kinerja



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Regulasi yang menjadi dasar dalam penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Adapun Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Laut berdasarkan peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membawahi :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Sosial Budaya.
- c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan .
- f. Bidang Perencanaan Makro.
- g. UPT Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Riwayat singkat perkembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dalam perjalanan selama beberapa kurun waktu Bappeda sebagai instansi Pemerintah Daerah telah memberikan andil yang cukup besar dalam membuat dan menyusun perencanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Sebelum otonomi daerah diberlakukan fungsi dan peran Bappeda kemungkinan tidak seberat sekarang ini, mengingat keterbatasan regulasi dari beberapa konsep yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak mengakomodir sistem perencanaan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya tidak jarang kendala-kendala yang sering dihadapi bagi daerah. Kreasi dan inovasi daerah tidak selalu mendapat dukungan yang kuat dari Pemerintah Pusat. Segala regulasi dan konsep-konsep

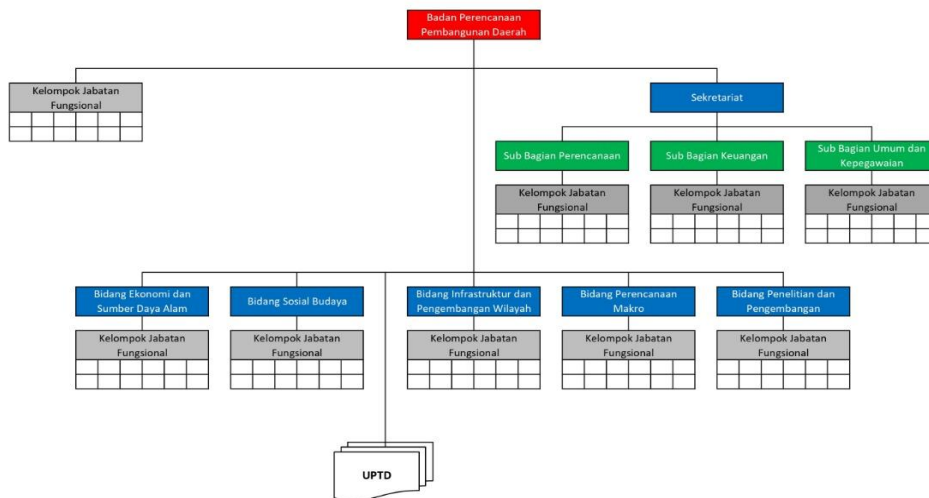
perencanaan lebih mengedapankan perencanaan yang bersifat Button Up semata.

Di era otonomi Daerah dan reformasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan Instansi yang sangat strategis dalam membuat dan menyusun perencanaan pembangunan daerah. Bappeda telah banyak menghasilkan beberapa dokumen-dokumen penting bagi perencanaan-perencanaan di daerah dan berusaha terus untuk memformulasikan regulasi dari pemerintah pusat sebagai dasar kebijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Beban kinerja Bappeda untuk saat ini, dari tahun ketahun dirasakan cukup berat dalam mengawal Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam batas kurun waktu yang telah ditetapkan.

2. Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Tanah Laut

a. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bappeda Kabupaten Tanah laut, berdasarkan peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.



b. Kepegawaian

Jumlah PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanah Laut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang yang terdiri dari :

1.	Kepala Bappeda	1	Orang
2.	Sekretaris Bappeda	1	Orang
3.	Kepala Bidang	5	Orang
4.	Kepala Sub Bagian	3	Orang
5.	Fungsional Perencana	6	Orang
6.	Fungsional Peneliti	2	Orang
7.	Fungsional Pranata Komputer	3	Orang
8.	Staf/Pelaksana	12	Orang
	Jumlah	33	Orang

Kualifikasi Pendidikan pada Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	SD	0	0	0
2.	SMP	0	0	0
3.	SMA	2	0	2
4.	D3	3	0	3
5.	S1	19	3	19
6.	S2	6	0	6
	Jumlah	30	3	33

Jumlah Pangkat dan Golongan Pegawai Bappeda Kabupaten

Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang
2.	Pembina TK. I	IV/b	2 Orang
3.	Pembina	IV/a	4 Orang
4.	Penata TK. I	III/d	6 Orang
5.	Penata	III/c	6 Orang
6.	Penata Muda TK. I	III/b	4 Orang
7.	Penata Muda	III/a	6 Orang
8.	Pengatur TK. I	II/d	4 Orang
	Jumlah	-	33 Orang

Adapun jumlah pejabat struktural dan fungsional Bappeda

Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Jabatan	Struktural	Fungsional
1.	Kepala Bappeda	1 Orang	-
2.	Sekretaris Bappeda	1 Orang	-
3.	Kepala Bidang	5 Orang	-
4.	Kepala Sub Bagian	3 Orang	-
5.	Pejabat Fungsional Perencana	-	6 Orang
6.	Pejabat Fungsional Peneliti	-	2 Prang
7.	Pejabat fungsional Pranata Komputer		3 orang
	Jumlah	10 orang	11 orang



c. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparat Bappeda didukung oleh sarana dan prasarana Bappeda sebagai berikut :

Gambaran Sarana dan Prasarana Bappeda Tahun 2022

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1.	Tanah	6753 M ²	B		
2.	Gedung	651 M ²	13		
3.	Kendaraan Roda 2	13 Buah	4		
4.	Kendaraan Roda 4	4 Buah	7		
5.	GPS	7 Buah	1		
6.	Mesin Ketik Manual	1 Buah	12		
7.	Lemari Besi	12 Buah	11		
8.	Rak Besi/Metal	11 Buah	18		
9.	Filling Besi/Metal	18 Buah	1		
10.	Brand Kas	1 Buah	21		
11.	Lemari Kayu	21 Buah	1		
12.	Papan Visuil	1 Buah	6		
13.	Alat Penghancur Kertas	6 Buah	1		
14.	Papan Pengumuman	1 Buah	1		
15.	White Board	1 Buah	2		
16.	Genset	2 Buah	7		
17.	Rak Kayu	7 Buah	56		
18.	Meja Kayu	56 Buah	2		
19.	Kursi Besi/Metal	2 Buah	40		
20.	Meja Rapat	40 Buah	1		
21.	Meja Podium	1 Buah	33		
22.	Kursi Rapat	33 Buah	2		
23.	Kursi Tamu	2 Set	107		
24.	Kursi Putar	107 Buah	21		
25.	Meja Komputer	21 Buah	5		

No .	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
26.	Kursi Kerja	5 Buah	1		
27.	Rak TV	1 Buah	12		
28.	Karpet	12 Meter	2		
29.	Meja Kerja	2 Buah	1		
30.	Mesin Potong Rumput	1 Buah	1		
31.	Lemari es	1 Buah	8		
32.	AC Unit	8 Buah	22		
33.	AC Split	22 Buah	2		
34.	Televisi	2 Buah	1		
35.	Wireless	1 Buah	3		
36.	Microphone Table Stand	3 Set	1		
37.	Camera Film	1 Buah	5		
38.	Handy Cam	5 Buah	1		
39.	Tandon Air	1 Buah	2		
40.	Tong Sampah	2 Buah	2		
41.	Mainframe	2 Buah	28		
42.	P.C Unit/ Komputer PC	28 Unit	14		
43.	Laptop	14 Buah	21		
44.	Notebook	21 Buah	44		
45.	Printer	44 Buah	7		
46.	Scanner	7 Buah	1		
47.	Ipad	1 Buah	7		
48.	Monitor	7 Buah	1		
49.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1 Buah	13		
50.	UPS	13 Buah	2		
51.	Stabilizer/ Stavolt	2 Buah	6		
52.	Harddisk Internal	6 Buah	35		
53.	Harddisk Eksternal	35 Buah	2		
54.	DVD-Rom Drive	2 Buah	1		
55.	Memory	1 Buah	1		
56.	Server	1 Unit	5		

No .	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
57.	Router	5 Buah	7		
58.	Proyektor + Attachment	7 Buah	1		
59.	Audio Amplifier	1 Buah	1		
60.	Microphone/Wireless Mic	1 Unit	5		
61.	Layar Proyektor	5 Buah	2		
62.	Loudspeaker	2 unit	2		
63.	Mixer Amplifier	2 Unit	2		
64.	Voice Recorder	2 Buah	4		
65.	Camera Electronic	4 Buah	1		
66.	Kompas	1 Buah	4		
67.	Handy Talky	4 Buah	3		
68.	Wireless Portable (Sound System)	3 Unit	9		
69.	CCTV	9 Buah	2		
70.	Gerobak Dorong	2 Buah	28		
71.	Kursi Lipat	28 Buah	1		
72.	Tangga Alumunium	1 Buah	1		
73.	Peralatan Jaringan Lain-lain	1 Set	1		
74.	automatic Volatge Regulator (AVR)	1 Buah	1		
75.	Tripod Camera	1 Buah	1		

d. Data Statistik

Bappeda tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan dimaksud.

e. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Bappeda tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan dimaksud.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Urusan Wajib

SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud

2. Urusan Pilihan

SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dengan Renja)

Rencana Kerja (Renja) Bappeda tahun anggaran 2022 sudah sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda 2018-2023.

- b. Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tahun 2022 meliputi :

1. Program, yaitu sebanyak 4 (Empat) yang menjadi arah dasar, sasaran dalam proses perencanaan kegiatan.
2. Kegiatan, yaitu sebanyak 16 (Enam Belas) kegiatan sesuai dengan kapasitas tupoksi keperluan perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
3. Sub Kegiatan, yaitu sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) sub kegiatan yang merupakan turunan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bappeda Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2022, dengan jumlah pagu murni sebesar Rp. 8.906.895.860 dan setelah berlalunya waktu ada perubahan anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 9.252.058.454,-. Dari total pagu belanja langsung tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 9.252.058.454,- terealisasi sebesar Rp. 8.444.207.785,-, dengan capaian realisasi keuangan pada seluruh program, kegiatan dan Sub Kegiatan sebesar 91.27 %. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh institusi Bappeda Kabupaten Tanah Laut dengan capaian, target dan sasaran dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan untuk pelaksanaan kegiatan yang menyangkut fisik persentasenya sebesar 99,21 %. Adapun disampaikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun anggaran 2022 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari :

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.252.058.454	8.444.207.785	91,27	99,21
5.01	PERENCANAAN				9.207.822.041	8.411.997.185	91,36	98,41

5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	75 nilai		8.411.218.290	7.889.206.077	93,79	95,24
5.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kegiatan perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	100 %	100 %	9.999.501	8.991.000	89,91	100,00
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	6 dokumen	6 dokumen	4.999.501	4.172.000	83,45	100,00
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	5.000.000	4.819.000	96,38	100,00
5.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	6.290.154.465	6.014.910.243	95,62	100,00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan TPP ASN Bappeda yang terbayarkan	12 bulan	12 bulan	6.279.156.390	6.004.281.043	95,62	100,00
5.01.01.2.02.04	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	5 Dokumen	5 dokumen	10.998.075	10.629.200	96,65	100,00
5.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase capaian kegiatan administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100 %		15.000.000	600.000	4,00	66,67
5.01.01.2.05.11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	3 ASN	2 ASN	15.000.000	600.000	4,00	66,67
5.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase capaian kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100 %		1.140.021.316	1.020.566.663	89,52	100,00
5.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik	(1) 11 jenis	11 jenis	24.655.959	22.798.000	92,46	100,00
		Jumlah Pemeliharaan Jaringan Listrik	(2) 1 Jenis	(2) 1 Jenis				
5.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	72 jenis	72 jenis	103.286.519	88.532.347	85,72	100,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	6 jenis	55.608.838	50.362.928	90,57	100,00

5.01.0 1.2.06. 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	1 jeni s	1 jeni s	3.480.0 00	360.000	10,3 4	100, 00
5.01.0 1.2.06. 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pameran	2 eve nt	2 eve nt	13.000. 000	13.000. 000	100, 00	100, 00
5.01.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	(1) jumlah Perjalanan Dinas, (2) Jumlah Rapat	(1) 561 Kali (2) 200 Kali	200 kali 60 kali	939.99 0.000	845.513 .388	89,9 5	100, 00
5.01.0 1.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		324.88 0.141	302.984 .000	93,2 6	100, 00
5.01.0 1.2.07. 10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarpras gedung kantor yang diadakan atau Bangunan Lainnya	25 Jeni s	25 jeni s	324.88 0.141	302.984 .000	93,2 6	100, 00
5.01.0 1.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		469.27 7.417	434.253 .071	92,5 4	100, 00
5.01.0 1.2.08. 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	3 jeni s	3 jeni s	118.35 2.500	84.658. 922	71,5 3	100, 00
5.01.0 1.2.08. 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	(1) jumlah jenis alat kebersihan, (2) jumlah PTT yang dibayarkan honoranya	(1) 24 jeni s, (2) 14 Ora ng	24 jeni s 14 ora ng	350.92 4.917	349.594 .149	99,6 2	100, 00
5.01.0 1.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		161.88 5.450	106.901 .100	66,0 4	100, 00
5.01.0 1.2.09. 01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	14.048. 716	13.658. 500	97,2 2	100, 00
5.01.0 1.2.09. 02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	(1) Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 yang dipelihara (2) Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 yang dipelihara	(1) 10 Unit (2) 6 Unit	10 unit 6 unit	102.23 6.734	60.720. 100	59,3 9	100, 00

5.01.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin dan lainnya yang dipelihara	7 Jenis	7 jenis	45.600. 000	32.522. 500	71,3 2	100, 00
5.01.0 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD	85 %		650.12 6.753	423.886 .098	65,2 0	100, 00
5.01.0 2.2.01	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Persentase capaian kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pendanaan	100 %		476.60 6.753	274.961 .098	57,6 9	100, 00
5.01.0 2.2.01. 07	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	(1) Jumlah Dokumen RKPD, (2) Jumlah Dokumen RKPD Perubahan	(1) 1 dok ume n, (2) 1 dok ume n	(1) 1 dok ume n, (2) 1 dok ume n	476.60 6.753	274.961 .098	57,6 9	100, 00
5.01.0 2.2.02	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		100.00 0.000	98.645. 000	98,6 5	100, 00
5.01.0 2.2.02. 01	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja	1 dok ume n	1 dok ume n	100.00 0.000	98.645. 000	98,6 5	100, 00
5.01.0 2.2.03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		73.520. 000	50.280. 000	68,3 9	100, 00
5.01.0 2.2.03. 03	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	(1) Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi berkala Pembangunan Daerah (2) Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Dana DAK	(1) 4 dok ume n (2) 4 dok ume n	4 dok ume n 4 dok ume n	73.520. 000	50.280. 000	68,3 9	100, 00
5.01.0 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD bidang perencanaan sosial budaya, bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber	85 %		146.47 6.998	98.905. 010	67,5 2	100, 00

		Daya Alam, bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah						
5.01.0 3.2.01	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %		29.085. 036	20.607. 600	70,8 5	100, 00
5.01.0 3.2.01. 01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJM dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Politik & Pemerintahan	4 lapo ran	4 lapo ran	4.121.8 89	3.383.5 00	82,0 9	100, 00
5.01.0 3.2.01. 03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Politik dan pemerintahan	1 dok ume n	1 dok ume n	7.439.7 75	4.986.9 00	67,0 3	100, 00
5.01.0 3.2.01. 05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJM dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia	4 lapo ran	4 lapo ran	4.999.9 54	3.923.3 00	78,4 7	100, 00
5.01.0 3.2.01. 07	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia	1 lapo ran	1 lapo ran	12.523. 418	8.313.9 00	66,3 9	100, 00
5.01.0 3.2.02	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	presentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %		80.373. 231	46.774. 610	58,2 0	100, 00
5.01.0 3.2.02. 01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)	(1) Jumlah Laporan Hasil FGD Analisa Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Laut (2)Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan	(1) 1 Lap ora n (2) 5 lapo ran	(1) 1 Lap ora n (2) 5 lapo ran	52.711. 600	37.084. 610	70,3 5	100, 00

		Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanindagkop						
5.01.0 3.2.02. 03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pertanindagkop	1 lapo ran	1 lapo ran	8.905.8 13	7.005.0 00	78,6 6	100, 00
5.01.0 3.2.02. 05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi, Fasilitasi Terkait sub Bidang SDA, Bang.Dunia usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 lapo ran	5 lapo ran	3.764.6 11	2.025.0 00	53,7 9	100, 00
5.01.0 3.2.02. 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang SDA, Bang.Dunia Usaha , Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 lapo ran	1 lapo ran	14.991. 207	660.000	4,40	100, 00
5.01.0 3.2.03	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %		37.018. 731	31.522. 800	85,1 5	100, 00
5.01.0 3.2.03. 01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur	2 lapo ran	2 lapo ran	1.999.4 72	1.800.0 00	90,0 2	100, 00
5.01.0 3.2.03. 03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi capaian pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur	1 lapo ran	1 lapo ran	13.879. 472	9.415.0 00	67,8 3	100, 00
5.01.0 3.2.03. 05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pengembangan Wilayah	1 lapo ran	1 lapo ran	16.389. 647	15.883. 400	96,9 1	100, 00

5.01.0 3.2.03. 07	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah	1 lapo ran	1 lapo ran	4.750.1 40	4.424.4 00	93,1 4	100, 00
5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				44.236. 413	32.210. 600	72,8 1	100, 00
5.05.0 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	75 %		44.236. 413	32.210. 600	72,8 1	100, 00
5.05.0 2.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase capaian hasil kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %		-	-	0,00	0,00
5.05.0 2.2.01. 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen	100 %		-	-	0,00	0,00
5.05.0 2.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kajian Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %		15.010. 000	5.286.6 00	35,2 2	100, 00
5.05.0 2.2.02. 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen	1 dok ume n	1 dok ume n	15.010. 000	5.286.6 00	35,2 2	100, 00
5.05.0 2.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase capaian hasil kajian Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %		29.226. 413	26.924. 000	92,1 2	100, 00
5.05.0 2.2.04. 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Software Inovasi Daerah	1 soft war e	1 soft war e	29.226. 413	26.924. 000	92,1 2	100, 00

1. Belanja Operasi :

Belanja Pegawai	Rp. 6.279.156.390,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.637.130.188,-
Jumlah.....	Rp. 8.916.286.578

2. Belanja Modal :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ... Rp. 313.571.876,-
2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 22.200.000,-

Jumlah **Rp. 335.771.876,-**

Bappeda Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD tahun anggaran 2022, pada APBD TA 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 8.028.919.744,- dan mengalami perubahan pada DPPA-SKPD di APBD-Perubahan TA 2022 menjadi Rp. 9.252.058.454,- yang artinya ada penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 1.223.138.714,-.

d. Permasalahan dan solusi

Dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan dalam suatu instansi tentu tidak akan lepas dari permasalahan yang dihadapi, beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan ekonomi kreatif Anggaran Rp. 18.755.818,- realisasi fisik 100% dan keuangan 14,32%

Isi kegiatan ini diantaranya :

- a. Rapat Koordinasi tanggung jawab sosial lingkungan badan usaha (terkait penelaahan skema pengelolaan tanggung jawab sosial lingkungan badan usaha)

- b. Rapat koordinasi tanggung jawab sosial (terkait penyampaian SK Bupati no 188.45/45/1064-KUM/2022 dan rencana aksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha kabupaten Tanah Laut oleh SKPD.

Permasalahan ;

- a. Belum adanya SKPD yang mengampu kegiatan Tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha sesuai kewenangannya.
- b. Belum dilaksanakan sosialisasi SK Bupati No. 188.45/45/1064-KUM/2022 tentang Pembentukan tim Pembina dan Pengawas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 – 2023. Belum dilaksanakan rencana aksi tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha di Kabupaten Tanah Laut

Solusi ;

- a. Perlu kesepakatan bersama melalui rapat koordinasi dengan SKPD terkait untuk diputuskan siapa yang mengampu kegiatan Tanggung jawab sosial lingkungan badan usaha sesuai kewenangannya.
- b. Perlu sosialisasi SK Bupati no 188.45/45/1064-KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengawas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 – 2023 dengan anggota tim.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) sub koord bidang pertanian, industri, perdagangan dan koperasi dengan anggaran Rp. 61.617.413,- realisasi Rp. 44.089.610,- realisasi fisik 100% dan keuangan 71.55%.

Isi kegiatan ini diantaranya adalah Fasilitasi koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian. Fasilitasi rapat pemantauan dan dukungan percepatan penyediaan PSN yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. FGD Pengelolaan lahan rawa untuk pertanian di Kabupaten Tanah Laut. Rapat koordinasi dan evaluasi program YESS di Kabupaten Tanah Laut. Fasilitasi kunjungan dan wawancara dalam rangka pengumpulan informasi lapangan kegiatan *metropolitan statistic area* bidang *small area estimation 2022*. *Focus Group Discussion* Analisa kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Laut. Rapat Monitoring dan evaluasi kinerja SKPD

Permasalahan

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan SKPD lingkup bidang Ekonomi dan SDA masih ada yang belum selaras sehingga perlu pendampingan diluar jadwal verifikasi / asistensi sampai dengan mencapai keselarasan

2. Terdapat total luas lahan rawa pertanian 40,459 Ha di Kabupaten Tanah Laut yang potensial belum dikembangkan karena berbagai permasalahan lahan rawa seperti produktivitas hasil lebih rendah dibanding hasil yang ditanam di daerah yang bukan rawa, pengelolaan air yang terbilang susah dimana pada saat hujan akan terjadi banjir dan saat kemarau terjadi kekeringan
3. Program YESS merupakan salah satu program pusat dari Kementerian Pertanian yang ada di Kabupaten Tanah Laut, dimana belum fokusnya peran *District Implementation Team (DIT)* dalam Mensinergikan program pengembangan yang terkait dengan kewirausahaan muda di sektor pertanian
4. Belum optimalnya pelayanan satu data Tanah Laut dimana data yang pada aplikasi satu data Tanah Laut tidak selalu di update oleh SKPD sehingga bagi pengguna data harus melakukan verifikasi dan konfirmasi ke SKPD pemilik data
5. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut menunjukkan besaran yang fluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut mulai menunjukkan pertumbuhan yang menurun/melambat sejak 2011, meskipun capaiannya masih menunjukkan besaran yang positif. Sementara itu pada tahun 2020 kondisi perekonomian Kabupaten ini mengalami kontraksi pertumbuhan hingga mencapai -1,95 persen. Menurunnya pertumbuhan ekonomi ini diakibatkan

oleh adanya pandemic covid-19 yang menyerang seluruh dunia. Pandemi ini menyebabkan terganggunya kegiatan ekonomi di masyarakat, yang kemudian berpengaruh pada perekonomian di Kabupaten Tanah Laut.

6. Belum optimalnya SKPD lingkup bidang Ekonomi dan SDA dalam menyampaikan laporan kinerjanya, baik melalui aplikasi e monev maupun secara hardcopy

Solusi :

1. Perlu koordinasi yang intens dengan SKPD lingkup bidang ekonomi dalam penyusunan dokumen perencanaan agar selaras dengan RKPD baik melalui pendampingan / asistensi diluar jadwal verifikasi yang sudah ditentukan
2. Perlunya Kerjasama dengan Ballitra untuk pengelolaan / pemanfaatan lahan rawa di kabupaten Tanah Laut
3. Mendorong *Distrik Implementation Team (DIT)* agar lebih berkoordinasi dengan tim *Distrik Coordination Team (DCT)* melalui rapat kerja terkait sinergitas program pengembangan yang terkait dengan kewirausahaan muda di sektor pertanian
4. Optimalisasi pelayanan satu data melalui rapat koordinasi dengan SKPD terkait, dan perlu adanya operator menginput data di SKPD masing-masing agar data selalu update dan dapat dipublikasikan

5. Perlunya penajaman indikator program SKPD yang selaras dengan 17 indikator pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berdampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi

6. Perlu rapat koordinasi dengan SKPD lingkup bidang Ekonomi dan SDA untuk memperoleh data informasi kinerja SKPD dan melalui surat permintaan laporan kinerja SKPD serta surat menyampaikan input laporan monev pada aplikasi emonev

3. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Wilayah.

Jumlah anggaran Rp. 21.139.787,- realisasi fisik 100 %, realisasi 96,06 %.

Permasalahan/kendala :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak maksimal dikarenakan SKPD kurang memberikan data yang tepat pada lokasi kegiatannya
2. Pelaksanaan rapat koordinasi terkendala karena tidak dapat mengundang banyak orang, sehingga serapan anggaran rapat minim

Solusi :

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terjadwal per triwulan

2. Rapat melalui daring atau sekalipun dilaksanakan dengan mengundang banyak orang tetap diperhatikan protokol Kesehatan.

4. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infastruktur Wilayah.

Anggaran Rp. 37.018.731,- realisasi fisik 100%, keuangan 85,15%

Pemasalahan :

1. Perbedaan waktu pelaksanaan monev dengan SKPD terkait
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak maksimal dikarenakan SKPD kurang akurat memberikan data yang tepat pada lokasi kegiatannya

Solusi :

1. Rapat menggunakan media online / daring
2. Rapat koordinasi hanya mengundang anggota tim inti

Menganggarkan kembali dana monev dan rapat di APBD perubahan

5. Kegiatan Penyusunan RKPD

Kegiatan Penyusunan RKPD merupakan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda untuk melakukan perencanaan lingkup kabupaten Tanah Laut.

Anggaran Rp. 650.126.753,- realisasi fisik 100%, keuangan 65,20%

Perencanaan yang dilakukan sesuai permendagri 86 Tahun 2017 dimulai dengan membuat :

- Rancangan Awal RKPD yang disertai dengan proyeksi anggaran
- Musrenbang Kecamatan
- Forum Konsultasi Publik
- Forum SKPD
- Musrenbang RKPD
- Rancangan Akhir RKPD

Dalam proses penyusunan ini bersama Tim RKPD, melalui pokja bidang masing-masing melakukan proses dan verifikasi terhadap renja SKPD sehingga program dan kegiatan prioritas dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan :

Masalah yang sering muncul adalah karena proses perencanaan ini memerlukan waktu sehingga keterlambatan dalam pengumpulan dokumen atau bahan yang diminta Bappeda tidak sesuai jadwal.

Solusi :

Selalu melakukan komunikasi secara kontinyu terhadap kasubbag perencanaan SKPD

6. Kegiatan Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Anggaran Rp. 73.520.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 68,39%

- menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi RKPD / APBD tahun 2022
- melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui sistem aplikasi e monev
- melaksanakan monev pelaksanaan program dan kegiatan ke lapangan
- rapat internal lingkup Bappeda yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
- menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan DAK maupun pengusulan DAK
- fasilitasi evaluasi dan perencanaan serta pembiayaan untuk pembangunan daerah yang bersumber dari dana DAK
- melaksanakan penyusunan laporan dana DAK

Permasalahan :

- Secara kegiatan, pelaksanaanya sudah terpenuhi tapi tidak optimal, karena banyak rapat-rapat koordinasi yang di selenggarakan secara online tidak tetap, sehingga belanja makan dan minum rapat tidak terbaca lisan
- Kurang tepat waktu SKPD memberikan hasil laporan yang diminta.

Solusi :

- Perlunya disusun program kerja dan penjadualan kegiatan yang tepat dan saling koordinasi sesama PPTK yang mempunyai kegiatan-kegiatan dan jadwal masing-masing.
- Dapat mengatur batas waktu pengumpulan laporan pekerjaan sehingga dapat terpenuhi laporan yang direkap.

7. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Anggaran Rp. 15.010.000,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 35,22%

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Monitoring dan Evaluasi Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut di 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Takisung, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong , kecamatan Kintap. Dalam hal ini untuk mengetahui kegiatan di Kecamatan yang berkaitan dengan kemiskinan.
- Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dilaksanakan 3 kali rapat yaitu rapat pertama tentang Progres Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut, rapat ke dua tentang sinkronisasi rencana program penanggulangan kemiskinan dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut dan hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut, dan

rapat yang ke tiga tentang kondisi terkini data kemiskinan tahun 2020 kabupaten Tanah Laut dan hasil finalisasi verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten Tanah Laut.

- Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) (1 Dokumen). LP2KD ini di buat untuk menjelaskan perkembangan pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di kabupaten Tanah Laut selama ini, serta menjelaskan kinerja TKPKD dalam menyelenggarakan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut.

Permasalahan :

1. Tidak terealisasinya rapat Koordinasi Penanggulangan kemiskinan ke 2 karena terkendala waktu pelaksanaan dan regulasi serta data pensasaran pengentasan kemiskinan ekstrem (P3KE) yang belum didapatkan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
2. Koordinasi antar SKPD untuk penanggulangan kemiskinan belum optimal dikarenakan belum terpetakan secara program maupun kegiatan yang beririsan antar SKPD dalam

rangka penanggulangan kemiskinan daerah (*crosscutting* dan *cascading*)

3. Kegiatan Perjalanan Dinas dalam daerah untuk kegiatan monitoring evaluasi penanggulangan kemiskinan di realisasikan anggaran sesuai kebutuhan saja, namun Monitoring dan evaluasi di 11 Kecamatan tetap dilaksanakan melalui koordinasi dengan SKPD terkait (Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) baik dalam Kabupaten maupun dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Solusi :

1. Mengatur ulang jadwal Rapat Koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan berbasis pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Tanah Laut yang sudah didapatkan dari Satuan Tugas Data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan guna mensinergikan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah.
2. Mengidentifikasi, mengevaluasi program/kegiatan dan indikator yang dilaksanakan SKPD terkait serta mengintegrasikan program/kegiatan tersebut terhadap lokus sasaran kemiskinan, SKPD cenderung hanya melaksanakan program/kegiatan guna memenuhi target penyelesaian pekerjaan SKPD saja tanpa

memperhatikan/menyelaraskan pada sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD serta kebijakan dan Program pemerintah pusat sehingga impact yang dihasilkan dari program/kegiatan yang dilaksanakan SKPD tidak akan signifikan dalam penurunan angka kemiskinan daerah.

3. Mengagendakan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan program/kegiatan lingkup bidang sosial budaya untuk SKPD yang kegiatannya berupa pekerjaan non fisik dan meminta laporan kegiatan tersebut dalam bentuk laporan serta meningkatkan komunikasi, koordinasi baik secara langsung maupun melalui media komunikasi elektronik. Kepada SKPD dan pihak terkait dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah.

4. Urusan Pemerintahan Umum

SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah/Pemerintah

Provinsi

“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

2. Tugas Pembantuan yang diberikan

“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”



BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Daerah

“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

3. Pengelolaan Kawasan Khusus

“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini adalah wujud dari akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggaraan pemerintahan khususnya SKPD Bappeda, alokasi anggaran belanja Bappeda tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 9.252.058.454,- dengan penyerapan sebesar Rp. 8.444.207.785,- dengan realisasi keuangan 91,27% dan realisasi fisik sebesar 99,21%.

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Tanah Laut. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator

mikro. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

2. Keberhasilan/Prestasi /Penghargaan

Pada tahun 2021 Kabupaten Tanah Laut menerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Terbaik II.

Pada tahun 2022 Kabupaten Tanah Laut menerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Terbaik II.

Pelaihari, Januari 2023

KEPALA BAPPEDA KAB.TANAH LAUT,

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBIDIKASI	


ANDRIS EVONY, S.STP., M.SI.
Pembina Utama Muda // IV c
NIP. 19790928 199711 1 001